

**POLA REKRUTMEN CALEG PEREMPUAN  
OLEH PARTAI POLITIK  
PADA PEMILU LEGISLATIF PERIODE 2009-2014  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas*

*Oleh:*

**FEBRIANI  
BP 06 193 113**



**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**



## ABSTRAK

Febriani , 06193113, Jurusan Ilmu Politik, FISIP-UNAND Padang, Dengan Judul Skripsi: Pola Rekrutmen Caleg Perempuan Oleh Partai Politik Pada Pemilihan Legislatif Periode 2009-2014 Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagai Pembimbing I Dr. Sri Zulchairiyah, MA dan Pembimbing II Doni Hendrik, S.IP, MSoc SC. Skripsi ini terdiri dari 114 halaman dengan 19 referensi buku, 2 skripsi dan 2 peraturan serta peraturan-peraturan lainnya.

Salah satu tugas partai politik didalam menjalankan fungsinya adalah melakukan rekrutmen politik, di antaranya partai politik bertugas merekrut caleg pada Pemilu Legislatif. Disaat melakukan rekrutmen partai politik harus memperhatikan quota 30% perempuan, guna untuk meningkatkan derajat keterwakilan politik perempuan. Pada Pemilu Legislatif periode 2009-2014 tidak ada satupun caleg perempuan hasil rekrutmen partai politik yang berhasil duduk di Lembaga Legislatif Kabupaten Pesisir Selatan.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penyebab fenomena tersebut dan salah satu penyebab yang ingin dilihat adalah bagaimana pola rekrutmen caleg perempuan oleh partai politik pada pemilihan legislatif tahun 2009 di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mempergunakan metode penelitian kualitatif. Untuk menjelaskan pokok permasalahan dalam skripsi ini di gunakan beberapa teori. Teori tersebut adalah: Partai Politik, Rekrutmen Politik, Kandidat Perempuan, dan Sistem Pemilu Legislatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pola rekrutmen terhadap perempuan oleh partai politik pada pemilu legislatif periode 2009-2014 kabupaten Pesisir Selatan belum terlaksana dengan baik, partai merekrut perempuan hanya untuk memenuhi quota 30% perempuan. Dalam merekrut perempuan tidak terdapat signifikansi peraturan, partai lebih mempergunakan sistem klik. Pengambilan keputusan dalam rekrutmen dipegang oleh petinggi partai serta hanya diketahui oleh segelintir orang yang ada di dalamnya, dan ini sangat jelas bahwa bentuk seleksi yang dilaksanakan oleh partai politik tanpa pengaturan ketentuan dan prosedur yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa pola rekrutmen belum terlaksana secara demokrasi dan teori Alan Ware yang dipergunakan di dalam penelitian ini tidak terlaksana pada proses rekrutmen politik terhadap perempuan saat pemilu legislatif periode 2009-2014 kabupaten Pesisir Selatan.

**Kata Kunci:** Partai Politik, Caleg Perempuan, Rekrutmen Politik, dan Sistem Pemilu Legislatif.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. 1. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi, negara demokrasi menunjukkan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat dan sebab itu dirumuskan kekuasaan berada ditangan rakyat.<sup>1</sup> Kekuasaan merupakan alat utama di dalam interaksi politik dimana dan kapanpun proses itu berlangsung. Demokrasi merupakan salah satu bentuk dari sebuah negara modern sebagaimana menurut Samuel Huntington bahwa negara modern adalah negara demokratis yang memberikan ruang khusus bagi keterlibatan rakyat dalam jabatan-jabatan publik, dan pemilu adalah media pembangunan partisipasi politik rakyat dalam negara modern. Jadi pemilu bagian dari sistem pemerintahan demokrasi.

Menurut Nohlen pemilu merupakan suatu metode demokratik untuk memilih wakil rakyat.<sup>2</sup> R. William Liddle menyatakan di dalam sistem pemerintahan demokrasi, pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktek pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut UU dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen termasuk para

---

<sup>1</sup> Untuk pemikiran yang berasal dari Indonesia tentang hal ini lihatlah Deliar Noer, Pengantar Ke Pemikiran Politik, Jilid I yang membahas Pemikiran Hatta Dan Soekarno Medan: Dwipa, 1965, hlm. 141-166. Sekarang diterbitkan Penerbit CV. Rajawali dengan judul yang sama: Pengantar Kepemikiran Politik (Jakarta, 1983).

<sup>2</sup> Toni Andrianus Pito Dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 298



pemimpin pemerintahan.<sup>3</sup> Sementara Maurice Duverger menyatakan dimana ada pemilihan merdeka dan bebas, disitu ada demokrasi.<sup>4</sup>

Pada pemilu kita mengenal adanya pemilihan legislatif, pemilihan legislatif merupakan suatu proses pemilihan umum yang memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di lembaga legislatif.<sup>5</sup> Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem pemerintahan demokrasi perwakilan. Sebagai negara dengan sistem pemerintahan demokrasi perwakilan maka partai politik memiliki peran penting dalam proses perwakilan, jika mereka gagal didalam memainkan peranan tersebut maka seluruh bangunan besar itupun rusak.<sup>6</sup>

Partai politik menjadi suatu wadah penting dalam pemilu, partai politik merupakan sebuah organisasi yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuannya untuk mendapatkan kekuasaan serta kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka.<sup>7</sup> Sigmund Neumann memberikan defenisi tentang partai politik yang lebih menekankan bagaimana kelompok yang terorganisir tersebut dalam memperebutkan kekuasaan harus bersaing dengan kelompok lain sejenis yang berbeda pandangan. Neumann memberikan defenisi partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 300

<sup>5</sup> Lembaga legislatif adalah Suatu lembaga perwakilan rakyat, yang menjadi tempat para wakil rakyat saling memperjuangkan aspirasi orang yang diwakilinya (masyarakat).

<sup>6</sup> Hans-Dieter Klingemann Dkk, *Partai Kebijakan dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.1

<sup>7</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6. 1. Kesimpulan

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya satupun caleg perempuan yang berhasil duduk untuk menjadi anggota legislatif di lembaga legislatif kabupaten Pesisir Selatan periode 2009-2014 disebabkan oleh pola rekrutmen yang dipergunakan oleh partai politik di dalam merekrut caleg perempuan belum baik. Pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik tidak ada kejelasan, di dalam merekrut caleg perempuan partai politik lebih mempergunakan sistem klik.

Terhadap tingkat kekuasaan unit pengambil keputusan saat melakukan rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik lebih bersifat dari atas ke bawah yaitu pemimpin memiliki peran utama dalam pengendalian tugas, dan pimpinan utama memiliki kekuasaan besar dalam memutuskan sebuah kebijakan. Semua aturan lebih didominasi oleh segelintir aktor-aktor politik dari partai politik yang berwenang dalam tugas rekrutmen politik. Dan atas kebijakan akan quota 30% perempuan juga terdapat ketidakkonsistenan dari pihak partai dalam pelaksanaannya, sebab caleg perempuan yang terpilihpun masih kurang dari quota 30% tersebut.

Jadi untuk kasus rekrutmen politik terhadap caleg perempuan yang dilakukan oleh partai politik pada pemilu legislatif periode 2009-2014 kabupaten Pesisir Selatan, teori miliknya Alan Ware tidak terlaksana karena demokrasi

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amal, Ichlasul. 1996. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
- Andrianus Pito. Toni, Efriza, Fshah, dan Kemal. 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Bandung: Nuansa
- Anugerah, Astrid. 2009. *Keterwakilan Perempuan dan Politik*. Jakarta: Pancuran Alam
- Budiarjo, Miriam. 1981. *Partisipasi Dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia
- \_\_\_\_\_. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- \_\_\_\_\_. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang-Bidang Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Setia
- Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya. 1998. *Materi Penyegaran Kader Golongan Karya*. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2006. *Kebijakan DPP Partai Golkar Berdasarkan Hasil Rapimnas II Partai Golkar Tahun 2006*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPP Partai Golkar